

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp15,0 T (1036,2%)
▼ -33,5% (yoy)

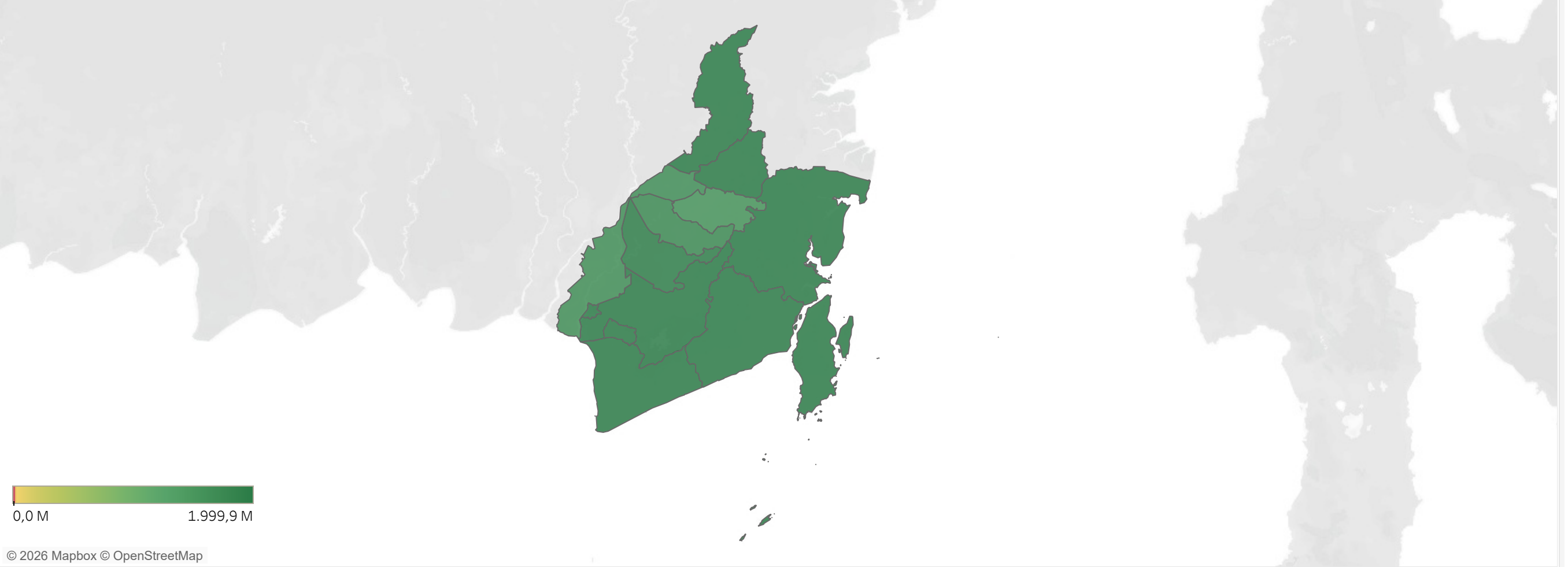
Belanja

Rp40,3 T (96,3%)
▼ -2,4% (yoy)

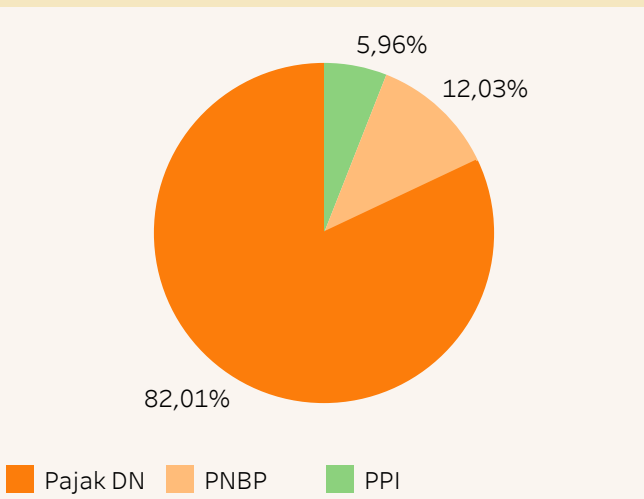
Defisit

Rp-25,3 T (62,7%)
▲ 35,0% (yoy)

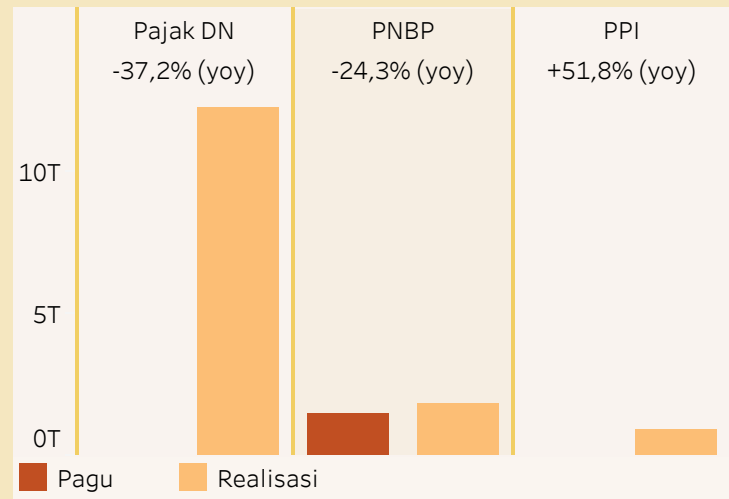
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



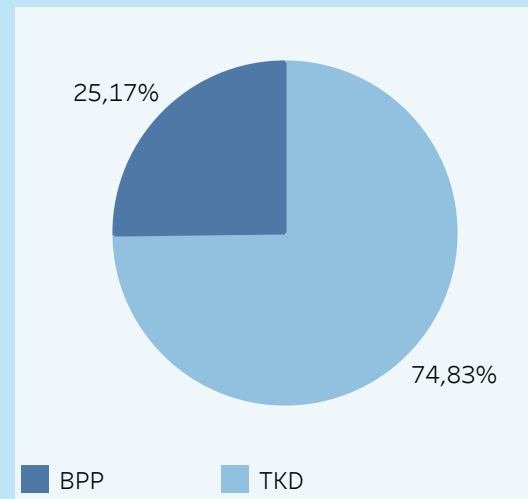
Persentase Komposisi Pendapatan



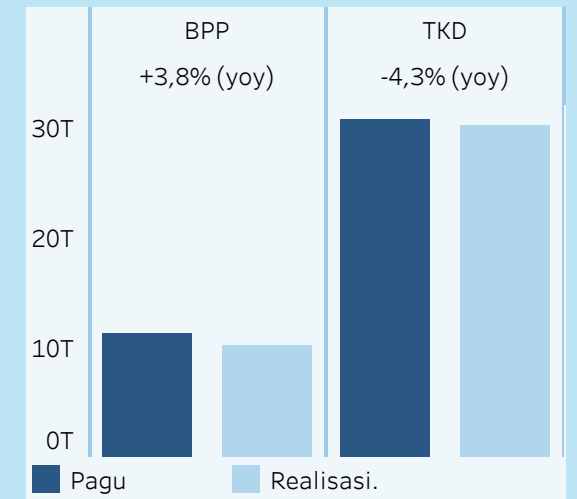
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



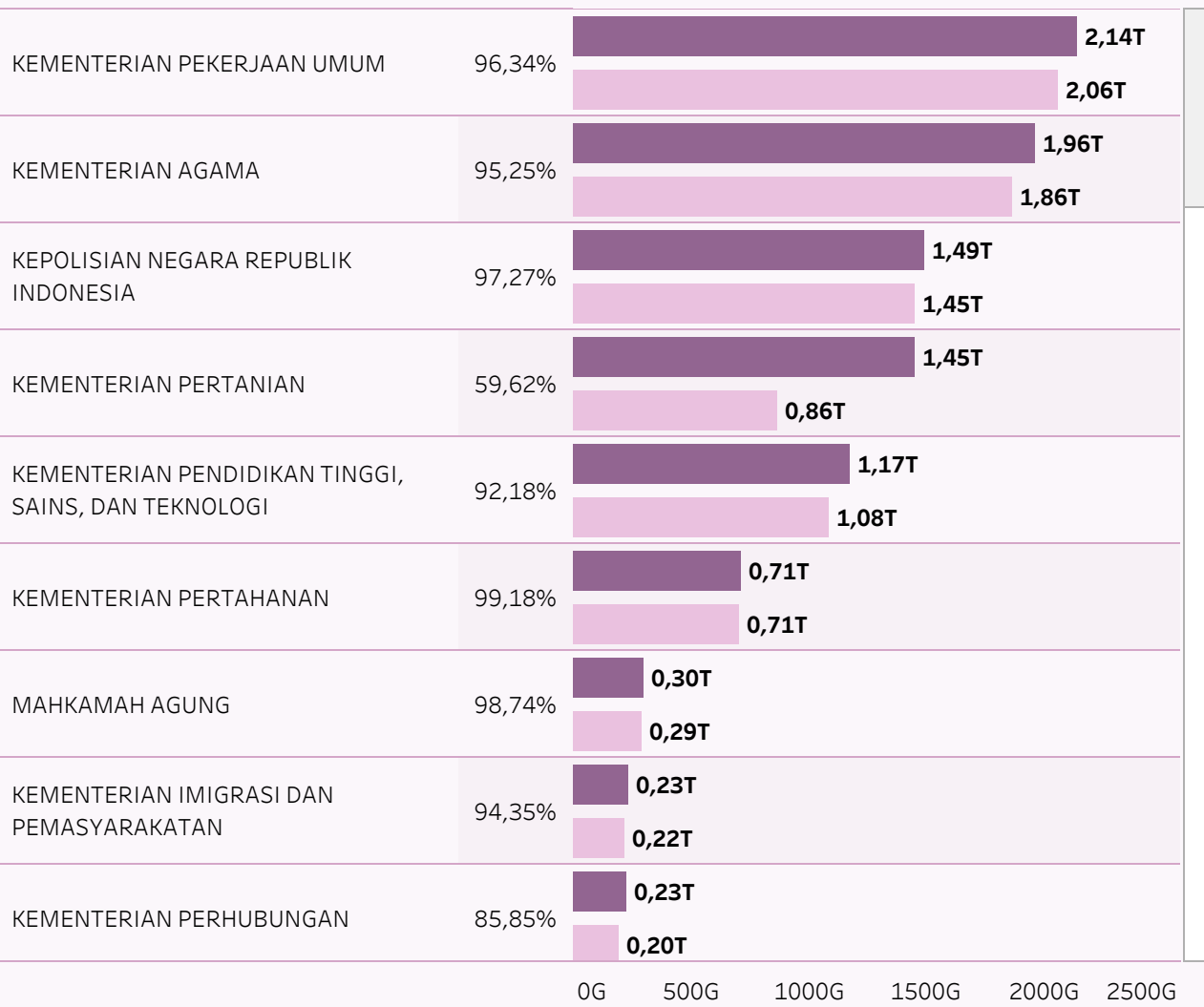
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	22,5T	15,0 T	▼ 33,53%
Grand Total	22,5T	15,0 T	▼ 33,53%

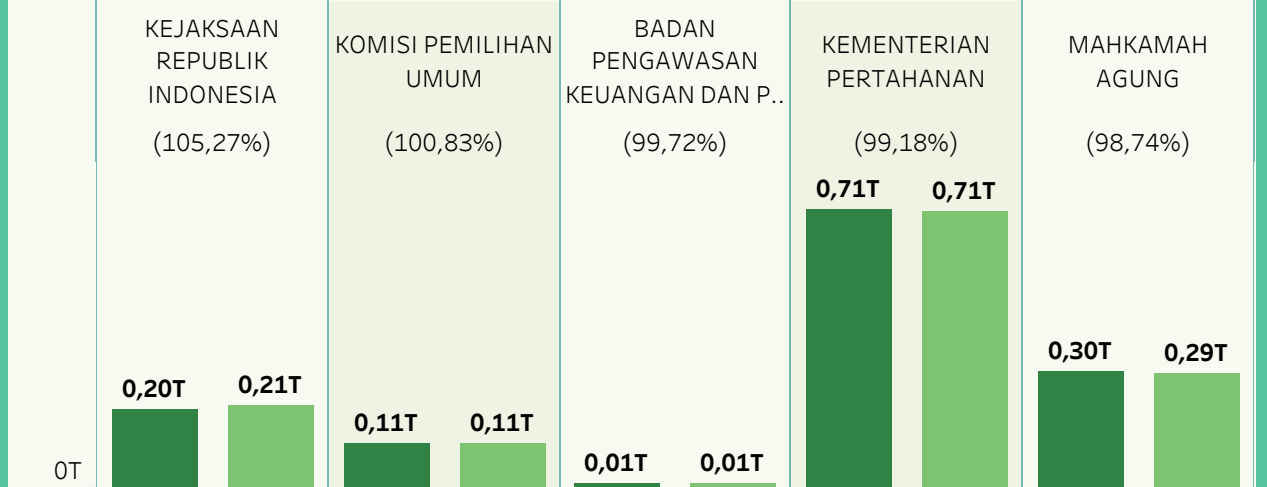
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	41,3T	99,0%	41,8T	40,3 T	96,3%	▼ 2,37%
Grand Total	41,7T	41,3T	99,0%	41,8T	40,3 T	96,3%	▼ 2,37%

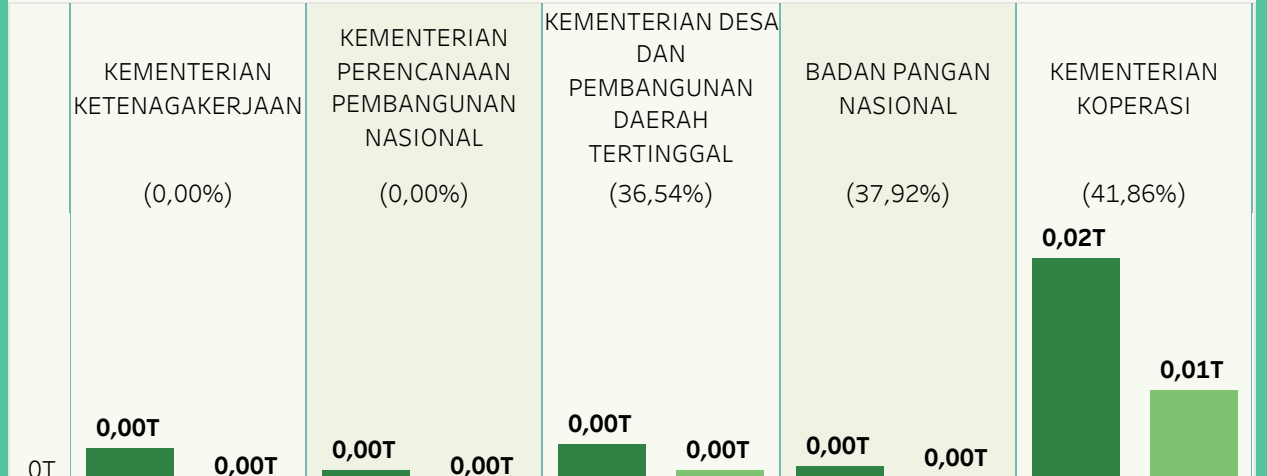
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



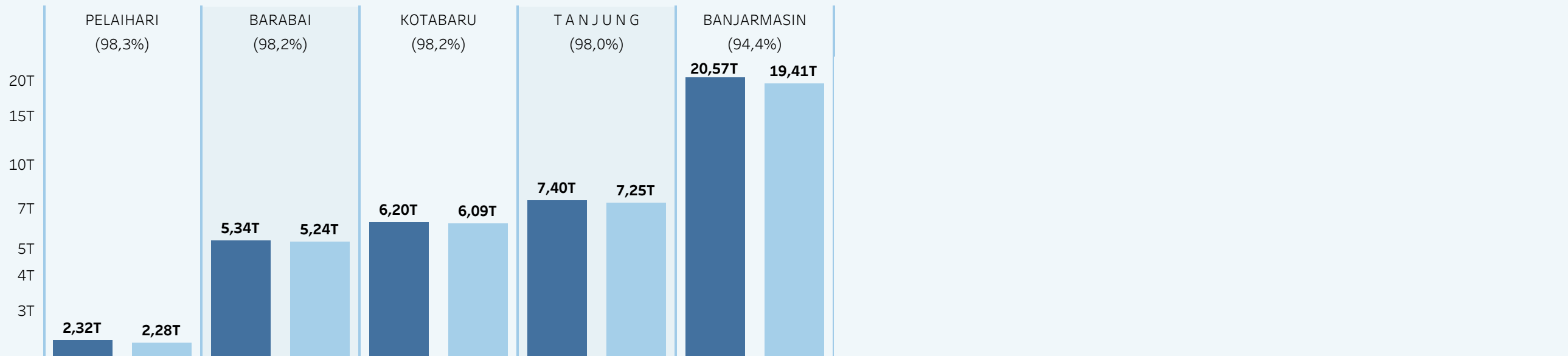
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



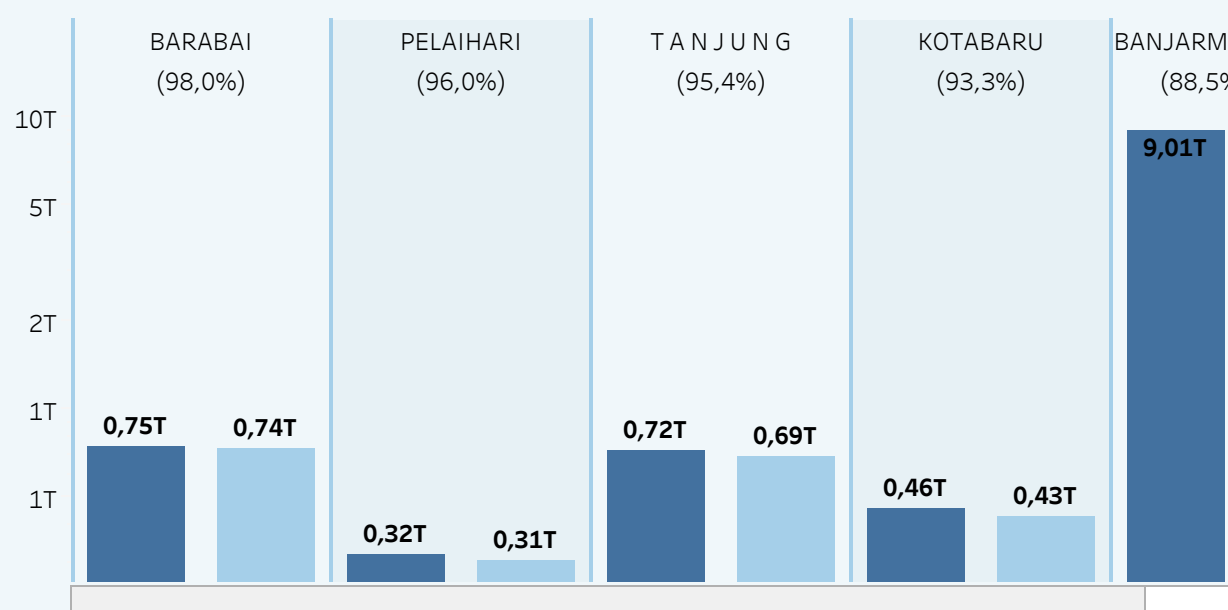
5 KL Persentase Realisasi Terendah



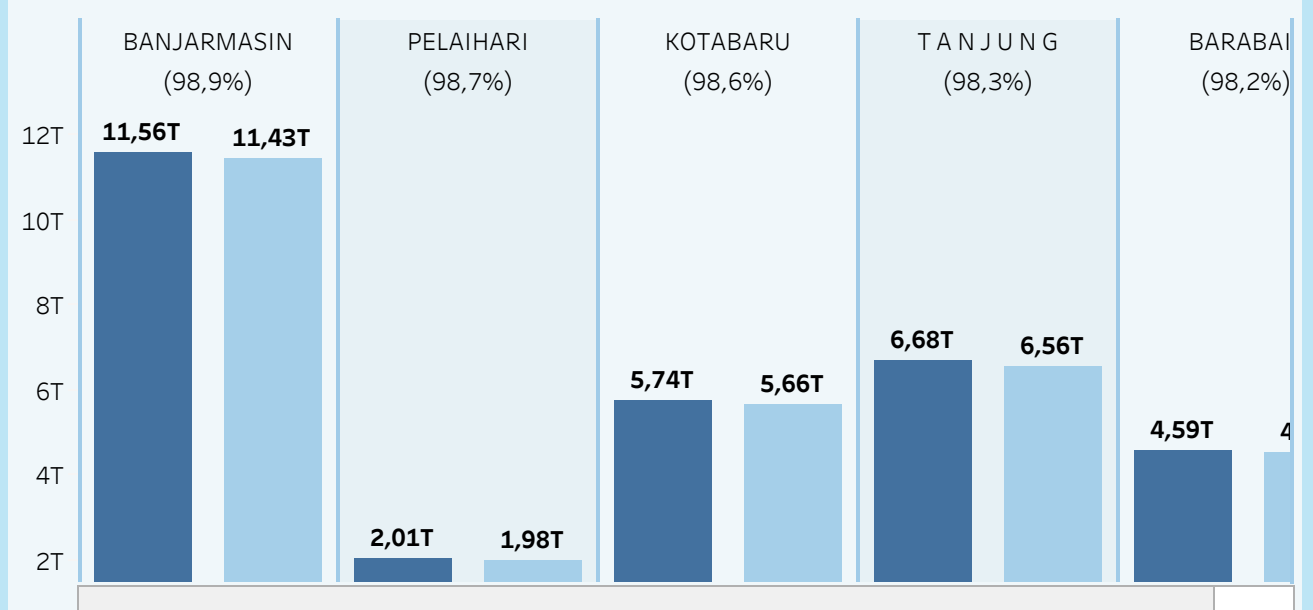
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 31 Desember 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp14,96 triliun (67,83%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun, terkontraksi 33,53% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 60,25% (Rp 12,27 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 343,21% (Rp891,55 miliar), serta PNPB mencapai 125,67% (Rp1,80 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (82,01%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 31 Desember 2025

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp40,3 triliun (96,3%) dari pagu Rp41,8 triliun, terkontraksi 2,37% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 90% (Rp10,14 triliun) dari pagu Rp11,26 triliun, tumbuh 3,8% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 98,6% (Rp30,14 triliun) dari pagu Rp30,57 triliun, terkontraksi 4,3% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (74,83%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,14 triliun, dengan realisasi mencapai 96,34% (Rp2,06 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 99,18% (Rp0,71 triliun) dari pagu Rp0,71 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 59,62% (Rp0,86 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kejaksaan RI dengan realisasi 105,27% (Rp0,21 triliun) dari pagu Rp0,20 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan realisasi 36,54% (Rp1,08 miliar) dari pagu Rp2,95 miliar. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional realisasi belanjanya masih 0%.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Pelahari dengan realisasi sebesar 98,3% (Rp2,28 triliun) dari pagu Rp2,32 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 94,4% (Rp19,41 triliun) dari pagu Rp20,57 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Kementerian Keuangan berencana akan mengevaluasi terhadap kebijakan restitusi pajak yang saat ini sedang berlangsung. Evaluasi ini mencakup perhitungan ulang dampak penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penerimaan negara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal yang efektif dan

berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi saat ini.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi kebijakan restitusi pajak secara transparan, berbasis data, dan melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk pelaku usaha dan wajib pajak, dengan tetap menjaga kepastian hukum serta iklim investasi.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Masih tingginya nilai pagu minus belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar -Rp32.241.689.309,- yang tersebar pada 43 Satker. Beberapa penyelesaian pagu minus tersebut perlu dilakukan secara terpusat melalui eselon I K/L yaitu Kejaksaan RI, KPU, Kementerian Pekerjaan Umum, BPKP, BNN, BKN, dan Badan POM.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker agar melakukan inventarisasi pagu minus belanja pegawai untuk persiapan penyelesaian secara internal satker, atau berkoordinasi dengan eselon I terkait strategi penyelesaian pagu minus sambil menunggu kebijakan pembukaan periode perbaikan data dari DJPb, serta Kanwil DJPb dan KPPN agar selalu melakukan monitoring status pagu minus belanja pegawai dan segera menyampaikan laporannya kepada satker yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 11.508 menjadi 11.597 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 11.078 unit menjadi 11.218 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 700 lokasi menjadi 702, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.447.667.422.286,- menjadi Rp1.466.024.347.286,-.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun SIMKOPDES (*microsite*) sebanyak 2.013.
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 836 menjadi 928.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 940 menjadi 1.060.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 118 menjadi 147.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis semula 382 menjadi 431.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | Revitalisasi Sekolah, Jumlah target revitalisasi sekolah di provinsi Kalimantan Selatan adalah 311 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab untuk Ditjen PDM 219 dan Ditjen Vokasi PKPLK 28 sekolah, Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun 2025 dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun 2026 melalui skema *multi-years contract* (MYC).

F | SMA Unggul Garuda, Target sekolah garuda transformasi sebanyak 1 dan telah beroperasi 1 unit dengan nama SMAN Banua Kalsel, sementara untuk target dan realisasi sekolah garuda baru belum terdapat update informasi baru di Kalimantan Selatan.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp748,51 M (40,48%) menjadi Rp1,24 T (67,12%) dari pagu sebesar Rp1,85 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Penentuan lokasi pembangunan rumah MBR belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara lokasi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Perlu dilakukan identifikasi kawasan prioritas agar sesuai antara lokasi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

C | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

D | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Masih terdapat kesenjangan antara target percepatan pembentukan KDKMP dan kesiapan desa di Kalimantan Selatan.

Meskipun Kalsel termasuk tiga daerah tercepat dalam pembentukan KDKMP, dalam forum dialog yang telah dilakukan oleh Gubernur Kalsel dengan para Kepala Desa/Lurah masih menunjukkan adanya kebutuhan pemahaman, penguatan kapasitas, dan klarifikasi regulasi agar implementasi KDKMP berjalan efektif di seluruh desa.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperkuat perannya secara teknis dengan menyusun dan mensosialisasikan juknis dan SOP KDKMP yang seragam, melaksanakan bimbingan teknis terfokus bagi kepala desa, pengurus koperasi, dan pendamping desa, serta membentuk tim fasilitasi daerah lintas OPD dan kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan langsung, klarifikasi regulasi, dan asistensi administrasi di desa.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Ketergantungan tinggi pada validitas data sosial ekonomi pusat. Seleksi peserta didik berbasis DTSEN memerlukan sinkronisasi data yang kuat dengan kondisi riil di daerah, tanpa keterlibatan aktif pemda, berpotensi terjadi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Kementerian Sosial perlu memastikan akurasi DTSEN dengan memperkuat mekanisme pemutakhiran dan verifikasi lapangan secara periodik bersama pemda dan pendamping sosial, membuka akses validasi dan koreksi data bagi daerah, serta menetapkan juknis pemanfaatan DTSEN untuk seleksi peserta didik, sehingga ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dapat diminimalkan.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Progres revitalisasi sekolah di SDN 5 Guntung Manggis Banjarbaru telah selesai dilaksanakan, revitalisasi fisik berupa empat ruang kelas baru dan dua paket toilet (termasuk fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus), serta dukungan teknologi pembelajaran berupa *Interactive Flat Panel* (IFP). Pelaksanaan program juga melibatkan masyarakat lokal untuk pengawasan dan pemanfaatan tenaga kerja setempat, serta mendukung pengembalian fungsi ruang-ruang sekolah yang sempat dialihfungsikan sebelumnya.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Hasil revitalisasi perlu dimaksimalkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada pemanfaatan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ruang kelas baru dan teknologi seperti *Interactive Flat Panel* (IFP) dapat diintegrasikan dengan metode pembelajaran yang inovatif, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta penguatan literasi dan numerasi siswa. Keterlibatan masyarakat lokal yang sudah terbangun dapat dilanjutkan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan sekolah dan pengawasan pemeliharaan fasilitas, sehingga hasil revitalisasi berkelanjutan dan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara nyata.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikembalikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Untuk kegiatan optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat terdapat 68 kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA dan 21 kontrak berpotensi diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlu dilakukan *review* teknis dan administrasi melalui penetapan milestone progres mingguan, penguatan monitoring lapangan, serta evaluasi ketat terhadap 21 kontrak yang berpotensi diperpanjang dengan memastikan dasar teknis dan administratifnya terpenuhi, sehingga perpanjangan waktu hanya diberikan secara selektif dan penyelesaian pekerjaan tetap terkendali.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off-grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG mengalami peningkatan semula 195 menjadi 208, jumlah supplier semula 250 menjadi 309, dan penerima manfaat semula 497.849 menjadi 567.758 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Pada tahun pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih banyak masalah yang perlu diperbaiki. Sejumlah masalah yang menjadi sorotan di Kalimantan Selatan adalah terkait kualitas makanan hingga kasus keracunan.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Pemda bersama penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melakukan evaluasi menyeluruh dengan memperketat standar kualitas dan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Pengawasan rutin oleh dinas kesehatan harus diperkuat, disertai pelatihan higienitas dan keamanan pangan bagi penyedia makanan.